



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

RESUME RISALAH RAPAT
GABUNGAN KOMISI I DAN KOMISI IV

Tahun Sidang	: 2025
Jenis Rapat	: Rapat Pembahasan Raperda RPJMD
Hari, Tanggal	: Senin, 14 Juli 2025
Waktu	: 13.00 WIB – WIB
Tempat	: Ruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi
Ketua Rapat	: Ketua Marifatul Kamila, S.H. Wakil ketua PATEMO S.H.
Acara	: Rapat rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Tahun 2025 -2029.
Jalannya Rapat	: Ketua Rapat/Pansus memberikan kesempatan SKPD menyampaikan hasil dokumen RPJMD dan menyampaikan kepada anggota Pansus gabungan komisi 1 dan IV untuk kemudian ditanggapi seluruh anggota.

Jalannya rapat : pimpinan rapat membuka rapat pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2025 diruang khusus disampaikan bahwa rapat hari ini untuk penyempurnaan terhadap raparda RPJMD tahun 2025-2029 di awali pengantar dari BAPPEDA kabupaten Banyuwangi bahwa akan disampaikan paparan penyusunan Dokumen RPJMD tahun 2025-2029.

1. Kabupaten Banyuwangi dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka hingga angka 4,03 % di tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator utama yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Indikator ini sangat penting karena mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja serta efektivitas kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Urgensi dari TPT terletak pada dampaknya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, karena tingginya tingkat pengangguran dapat berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan, berkurangnya daya beli masyarakat, serta tekanan terhadap program jaminan sosial. Oleh karena itu, pemantauan TPT menjadi krusial bagi pemerintah daerah dan nasional dalam merancang strategi yang tepat guna

mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

2. Indeks Gini Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sedangkan semakin mendekati 1 menandakan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks ini memiliki urgensi yang besar dalam evaluasi kebijakan ekonomi dan sosial, karena ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, menurunnya mobilitas ekonomi, serta berkurangnya efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan Indeks Gini menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan pemerataan ekonomi serta mengidentifikasi strategi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial.

3. Tanggapan Anggota DPRD

Bapak Gofur :

1. Dalam menjalankan pemerintahan SKPD banyuwangi harus lebih mengedepankan kemudahan perizinan bagi investasi, karena banyak investor yang mengeluhkan sulitnya prosedur perizinan di banyuwangi termasuk saya sendiri yang sangat kesulitan mengurus perizinan untuk membuka perumahan di banyuwangi yang kemudian terpaksa investasi saya alihkan di kabupaten jember.
2. Untuk itu mohon memberikan kejelasan bagaimana situasi administrasi perizinan di SKPD sehingga bisa terjadi hal yang dianggap mempersulit

Ibu Umi Kulsum :

1. Sama halnya apa yang telah disampaikan sebelumnya, yang menjadi pertanyaan mengapa sampai terkesan sesulit itu?
2. Mohon untuk diberikan gambaran situasi agar kami anggota dewan dapat mendapatkan pemahaman yang ideal.

Bapak Gianto:

1. Apakah ada standar khusus dalam penghitungan pengangguran terbuka?
2. Karena hasil persentase 4,03% ini dirasa di lapangan berbeda karena masih banyak pengangguran dengan skill dan usia produktif di banyuwangi.

4. Jawaban SKPD:

Bapedda:

1. Banyak pengajuan PBGSLF yang memang menumpuk di dinas PU sedang kami tangani karena terbatas waktu dan sumber tenaga kerja kami.
2. Kami hanya mampu melakukan sidang pengajuang PBGSLF dalam sehari maksimal 5 sampai 7 pengajuan karena memang prosesnya yang cukup rumit

3. Sedangkan dalam satu pengajuan minimal dapat dilakukan sidang pengajuan minimal 2 kali sehingga ini yang cukup menguras waktu kami.

Dinas tenaga kerja:

1. Penghitungan angka pengangguran yang kami lakukan bersifat general atau menyeluruh dengan sistem opsi random sehingga tidak menggunakan sampling per kecamatan
 2. Sehingga mungkin di satu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain
 3. Hal tersebut yang menyebabkan seperti ini tidak sesuai karena kami mengakui tidak dapat menunjukkan angka di masing-masing kecamatan
5. Dinas Pendidikan menyampaikan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan dari 7,16 tahun pada tahun 2020 menjadi 7,78 tahun pada tahun 2024. Peningkatan cukup stabil terjadi setiap tahun, dengan kenaikan signifikan pada 2021-2022 ketika angka RLS meningkat dari 7,42 tahun menjadi 7,66 tahun. Tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menempuh pendidikan formal. Meskipun demikian, angka RLS di Banyuwangi masih menunjukkan bahwa rata-rata penduduk belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP atau setara. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih intensif untuk mendorong peningkatan partisipasi pendidikan di jenjang menengah dan tinggi, seperti program beasiswa, penyediaan sekolah yang lebih merata, serta peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil agar RLS dapat terus meningkat secara signifikan.

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 12,8 tahun, dan terus meningkat hingga mencapai 13,14 tahun pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam sektor pendidikan, yang berarti anak-anak di Banyuwangi diproyeksikan akan menempuh pendidikan selama lebih dari 13 tahun—setara dengan jenjang SMA/MA/ sederajat. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan standar ideal menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), angka ideal HLS seharusnya berkisar 15 tahun atau lebih, yang mencakup pendidikan hingga perguruan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian HLS Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah target ideal tersebut. Meski demikian, peningkatan tren capaian HLS di Kabupaten Banyuwangi telah berhasil didorong melalui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dikenal aktif mendorong transformasi digital dalam pendidikan, penguatan akses pendidikan melalui program “Banyuwangi Mengajar”, serta peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, program beasiswa untuk siswa kurang mampu juga menjadi salah satu kunci meningkatkan partisipasi sekolah.

6. Dinas perindustrian menyampaikan Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Banyuwangi secara konsisten mempertahankan peningkatan capaian kecuali di tahun 2023 yang mengalami sedikit penurunan. Peningkatan skor Indeks Inovasi Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi di berbagai sektor pelayanan publik. Predikat yang diraih menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi

terus mempertahankan budaya inovasi yang kuat Tantangan yang diklaim Kabupaten Banyuwangi salah satunya yaitu keterbatasan tenaga ahli dalam riset dan pengembangan inovasi di tingkat daerah. Selain itu, transformasi digital dalam mendukung inovasi berbasis digital perlu ditingkatkan. Terutama perdesaan, masih belum optimal untuk mendukung inovasi. Dalam konteks daya saing daerah, inovasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan menarik investasi, sehingga perlu strategi yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

7. DPMD menyampaikan Capaian persentase desa mandiri menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2021 mulai 47%, dan menjadi 94,7% tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemberdayaan desa dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kemandirian desa. Meskipun demikian, capaian ini masih menyisakan tantangan dalam mewujudkan desa mandiri dari total desa mandiri yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang masih perlu diatasi. Perhitungan desa mandiri yang sebelumnya menggunakan Indeks Desa Mandiri, di tahun 2025 akan berganti metologi perhitungannya menjadi Indeks Desa. Indeks Desa kini tidak hanya mengukur ketertinggalan, kemandirian, dan keberlanjutan desa, tetapi juga memperkuat dimensi tata kelola, inklusi sosial, dan ketahanan terhadap krisis. Penyempurnaan ini bertujuan meningkatkan akurasi pemetaan kondisi desa serta efektif.

8. Tanggapan tenaga ahli:

Bapak Hari PR:

1. Dalam hal pertanian sebaiknya banyuwangi memulai investasi yang ramah dengan hasil pertanian seperti membuat industri pangan yang memanfaatkan hasil pertanian baik beras maupun buah pengalengan dan lainnya.
2. Pemerintah desa harus lebih waspada dengan adanya koperasi merah putih yang akan berbenturan dengan BUMDES untuk kedepan harus lebih diperhatikan,
3. Untuk dinas pendidikan terkait beasiswa banyuwangi cerdas agar lebih maksimal memberikan bantuan agar tidak hanya parsial namun harus pembiayaan penuh

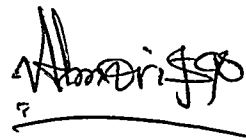
Bapak Demas Brian:

1. terkait penghitungan angka pengangguran terbuka bappeda menggunakan metode riset apa? Karena timbul banyak pertanyaan dari para anggota dewan.
2. pada umumnya metode riset yang umum digunakan dalam hal ini adalah model analisis ARIMA(AutoregressiveIntegrated Moving Average) adalah salah satu teknik paling umum yang digunakan dalam analisis data time series untuk memodelkan dan meramalkan perilaku data yang berubah sepanjang waktu. Model ARIMA terdiri dari tiga komponen utama seperti Komponen *Autoregressive*, *diferensiasi* dan *Moving Average*.
3. dalam hal penghitungan angka pengangguran ini apakah benar-benar hanya angka pengangguran terbuka?

1. karena pengangguran terselubung tidak termasuk yaitu pengangguran yang terjadi karena sistem kontrak kerja terbatas yang biasa kita kenal dengan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) dalam undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. sedangkan beberapa jenis pengangguran yang tidak tercantum antara lain: pengangguran friksional, struktural, siklis, musiman Selain keempat jenis pengangguran di atas, ada juga beberapa jenis pengangguran lainnya, seperti:
 - a. **Pengangguran Terselubung:**
Terjadi ketika seseorang memiliki pekerjaan tetapi tidak bekerja secara optimal, misalnya karena ketidakcocokan antara keterampilan dengan pekerjaan.
 - b. **Pengangguran Terbuka:**
Orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang berusaha mencari pekerjaan.
 - c. **Pengangguran Teknis/Teknologi:**
Terjadi akibat adanya otomatisasi dan penggunaan teknologi dalam proses produksi, yang menggantikan peran tenaga kerja manusia.

Penting untuk memahami berbagai jenis pengangguran ini agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran di suatu wilayah.

Banyuwangi, 14 Juli 2025
DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KETUA GABUNGAN KOMISI 1 DAN IV
RAPERDA RPJMD TAHUN 2025-2029



MARIFATUL KAMILA,SH